RENCANA AKSI

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2024

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
PENGANTAR DIREKTUR 1
BAB I PENDAHULUAN 2
A. Maksud dan Tujuan 2
B. Landasan Hukum 2
C. Struktur Organisasi dan SDM 3
D. Pengarusutamaan Gender 5
BAB II RENCANA AKSI 7
BAB III PENUTUP 11
BAB IV LAMPIRAN 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat PPSALHK 3
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Direktorat PPSALHK Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawasi Direktorat PPSALHK Berdasarkan Jabatan 5
Tabel 2. 1 Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7
Tabel 2. 2 Strategi dalam Mendukung Program Direktorat Jenderal PHLHK 8
Tabel 2. 3 Pembagian Target Kinerja Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK 9
Tabel 2. 4 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi pada Direktorat PPSALHK Tahun 2024 10

PENGANTAR DIREKTUR

Rencana Aksi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2024 ke depan lingkup Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam melaksanakan tugas penerimaan pengaduan, pengawasan badan usaha, dan pemberian sanksi sebagai tugas yang diembankan dalam upaya mewujudkan pembangunan Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah TA 2024 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024 serta Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024, dengan harapan dapat mencapai hasil sesuai rencana dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran dan sumber daya secara efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun selanjutnya.

Direktur,

Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M.
NIP. 19800331 200312 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) Tahun 2024 adalah dokumen rencana aksi tahunan kesembilan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran program dan sasaran kegiatan yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat PPSALHK terutama pencapaian sasaran kegiatan dalam mendukung capaian sasaran program di dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2024 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PPSALHK. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Direktorat PPSALHK sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Admnistrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/PHLHK/SET.10/SET.1/11/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
6. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Struktur organisasi Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada gambar 1.1.

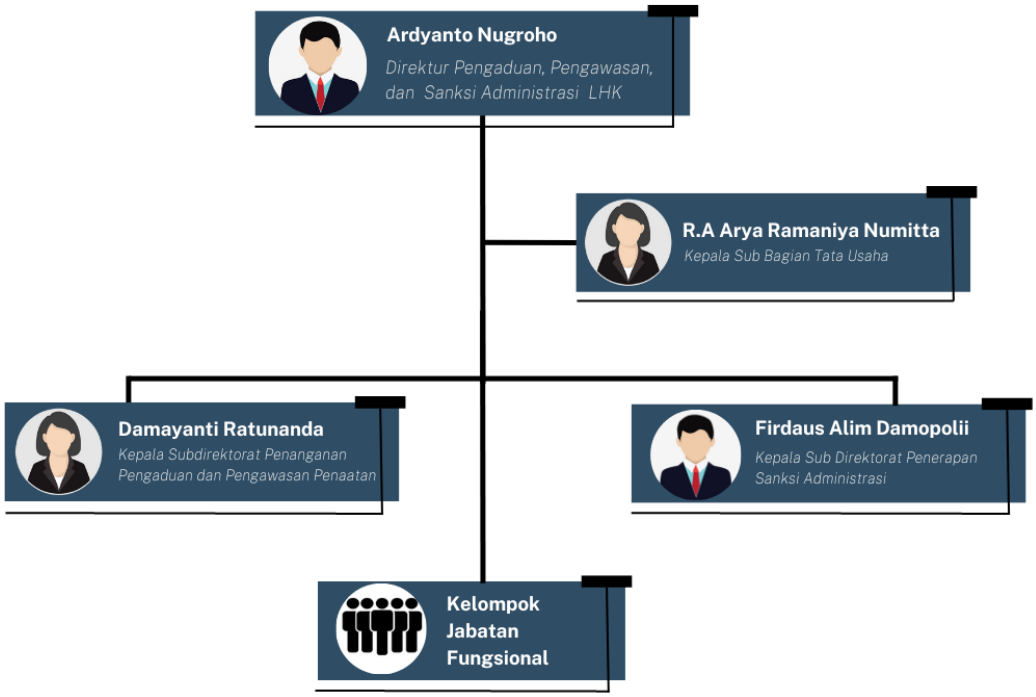

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat PPSALHK

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 85 orang, terdiri dari 74 orang PNS dan 11 orang PPNPN yang tersebar dimasing-masing sub direktorat dan subbagian tata usaha. Dari jumlah pegawai (PNS) apabila dilihat dari pangkat dan golongan, maka pegawai Direktorat PPSALHK terdiri dari pangkat dan golongan IV/c sebanyak 2 orang, IV/b sebanyak 8 orang, IV/a sebanyak 7 orang, III/d sebanyak 10 orang, III/c sebanyak 8 orang, III/b sebanyak 18 orang, III/a sebanyak 17 orang dan II/c sebanyak 4 orang dan Pegawai PPNPN sebanyak 11 Orang.

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Direktorat PPSALHK terdiri dari 35 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.2.

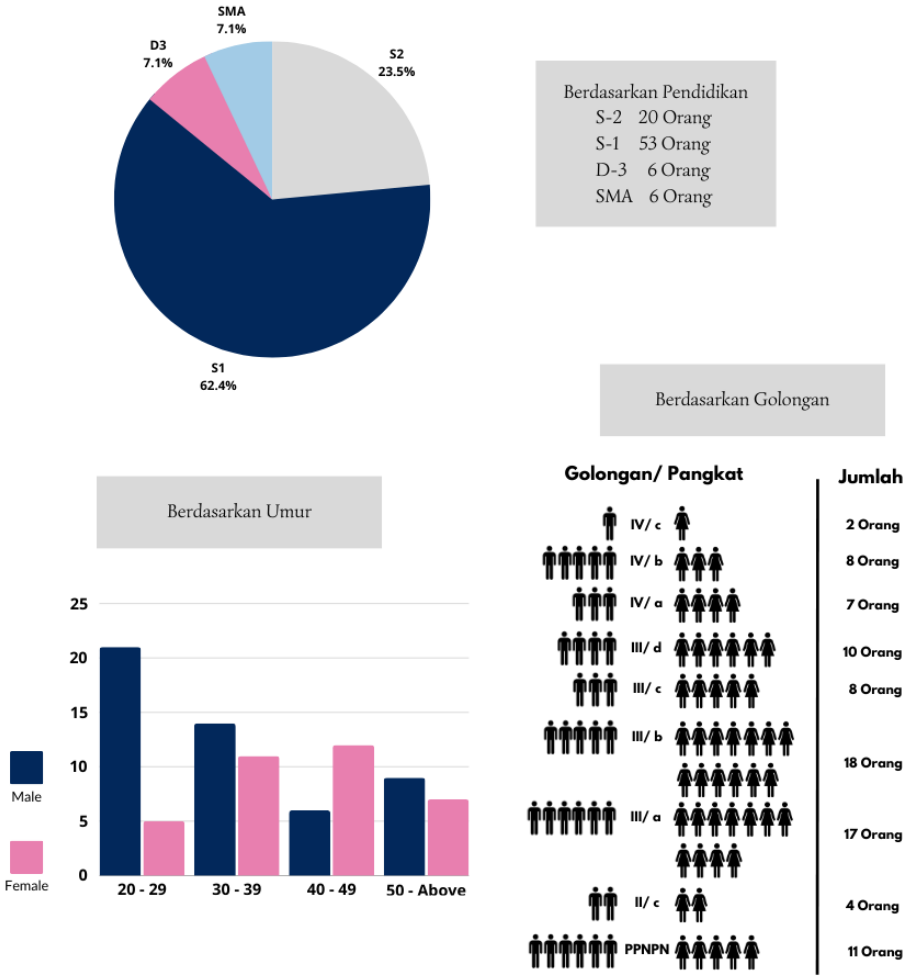

Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Direktorat PPSALHK Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan

Selain berdasarkan pangkat dan golongan, jenis kelamin, umur dan pendidikan berikut gambaran lebih lanjut mengenai sumber daya manusia Direktorat PPSALHK berdasarkan jabatannya.

Tabel 1. 1 Pegawasi Direktorat PPSALHK Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Struktural	4 Orang
Pengawas Lingkungan Hidup – Ahli Madya	11 Orang
Pengawas Lingkungan Hidup – Ahli Muda	16 Orang
Pengawas Lingkungan Hidup – Ahli Pertama	25 Orang
Polisi Kehutanan – Ahli Muda	1 Orang
Analis Hukum	6 Orang
Pengolah Data	2 Orang
Analis Data	2 Orang
Analis Kebijakan	1 Orang
Analis Pengelolaan Keuangan APBN – Ahli Pertama	1 Orang
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa – Ahli Pertama	1 Orang
Pranata Keuangan APBN – Terampil	1 Orang
Pranata Laksana Barang – Terampil	1 Orang
Pranata Komputer - Terampil	1 Orang
Pengelola Keuangan	1 Orang
PPNPN	11 Orang

D. Pengarusutamaan Gender

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berkomitmen pengarustamaan gender yang diimplementasikan salah satunya dengan mengeluarkan Surat Nomor P.31/MenLHK/Setjen/SET/I/5/2017 tentang Pedoman Pengarustamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai tindak lanjut dari komitmen Kementerian LHK, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK telah menyusun empat prioritas sebagai langkah organisasi untuk mendorong penerapan pengarustamaan gender tahun 2020-2024. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas staf Ditjen Penegakan Hukum LHK untuk mengimplementasikan *practical gender concern*;
2. Mewujudkan lingkungan kinerja yang sensitif gender;

3. Pengarustamaan gender dalam reformasi kebijakan dan peraturan dalam lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK;
4. Monitoring dan evaluasi yang sensitif Gender.

Direktorat PPSALHK turut mengimplementasikan prioritas-prioritas Ditjen Penegakan Hukum LHK yaitu :

Prioritas 1:

- Penerimaan PPLH dengan mengarustamakan gender.
- Pelatihan dan diklat PPLH dibangun dengan memasukkan modul-modul terkait gender yang dikembangkan secara bertahap.
- Pelatihan dan diklat PPLH dengan memperhatikan proporsi gender.
- Keikutsertaan staf dalam pelatihan menjadi fasilitator gender dan Sub-POKJA PUG.

Prioritas 2:

- Penyediaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan gender pada perempuan kondisi hamil.
- Menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui.

Prioritas 3:

- Pelibatan penyusunan regulasi dan pedoman dengan memperhatikan proporsi gender.
- Penyusunan ketentuan terkait pengawasan perusahaan untuk PPLH (perempuan) pada kondisi hami.
- Penyediaan ruang komunikasi untuk pengaduan kasus pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja.
- Jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas pengadu dan korban kasus pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja.

Prioritas 4:

- Evaluasi terhadap pelaksanaan sebagai monitoring terhadap keberhasilan pengarustamaan gender.

Berdasarkan data kepegawaian Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK terdapat 19 orang laki-laki dan 33 orang perempuan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang akan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2024, hal ini bertujuan untuk menunjang kinerja pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi menjadi lebih efektif dan efisien serta PPLH memiliki standar penggunaan sarana prasaranan yang sama dalam melakukan pengawasan.

BAB II
RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024, telah disampaikan bahwa kinerja Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah meningkatnya presentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Aksi Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Program Ditjen PHLHK	Indikator Program Ditjen PHLHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundang-undangan Bidang LHK	Persentase Pemegang Izin yang taat Terhadap Peraturan Terkait Bidang LHK

Tabel 2. 2 Strategi dalam Mendukung Program Direktorat Jenderal PHLHK

Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan Direktorat PPSALHK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rincian Output	Target RKP 2024	Satuan
Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
	Meningkatnya Pelaku Usaha/Kegiatan yang diawasi Terhadap Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan bidang LHK					
		Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				
			Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK			
				Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Udangan Bidang LHK	800	Badan Usaha
			Jumlah PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya			
				PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	250	Orang

Adapun pembagian target kegiatan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi untuk pusat dan balai dapat dilihat pada table 2.3.

Tabel 2. 3 Pembagian Target Kinerja Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK

KEGIATAN	PUSAT	SUM	JBN	KAL	SUL	MAP	TOTAL	SATUAN
5430 – Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi								
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha							800	Badan Usaha
Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK.	310	99	124	130	111	26	800	Badan Usaha
Penanganan Pengaduan Perusahaan	130	51	66	67	76	10	340	Badan Usaha
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	230	95	90	80	85	20	630	Pengaduan
Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Keutanan	180	48	58	63	35	16	410	Badan Usaha
Sanksi Administrasi	200	-	-	-	-	-	150	Sanksi
Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	1	-	-	-	-	-	1	Layanan
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							250	Orang
PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	250	-	-	-	-	-	250	Orang

Tabel 2. 4 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi pada Direktorat PPSALHK Tahun 2024

KODE	KEGIATAN	Anggaran
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK	Rp. 17.602.490.000
5430.QIH.001	Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Udangan Bidang LHK	Rp. 15.602.490.000
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	Rp. 3.314.500.000
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Rp. 2.162.000.000
053	Pengawasan Bidang LHK	Rp. 5.925.990.000
054	Sanksi Administrasi	Rp. 2.600.000.000
055	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 1.600.000.000
5430.DCE.001	PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	Rp. 2.000.000.000
051	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	Rp. 2.000.000.000

BAB III
PENUTUP

Tercapainya sasaran Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari unit kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik- baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi agar dapat mendukung pencapaian tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh.

RENCANA AKSI

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI LHK

DIRKETORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung			Anggaran	Satuan Output	Target Output	Target Output Triwulan			
		KRO	RO	Komponen				TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Pelaku Usaha/Kegiatan yang Diawasi Terhadap Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK		Rp. 15.602.490.000	Badan Usaha	310	55	142	241	310
				051. Penanganan Pengaduan Perusahaan	Rp. 3.314.500.000	Badan Usaha	130	25	62	101	130
				052. Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Rp. 2.162.000.000	Pengaduan	230	30	100	185	230
				053. Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 5.925.990.000	Badan Usaha	180	30	80	140	180
				054. Sanksi Administrasi	Rp. 2.600.000.000	Sanksi	200	45	105	165	200
				055. Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 1.600.000.000	Layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	051. Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	Rp. 2.000.000.000	Orang	250	70	150	210	250

Jakarta, 15 Januari 2023

Direktur,

Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M.

NIP. 19800331 200312 1 003

RENCANA AKSI

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI LHK

DIRKETORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2024

Martriks Rencana Aksi Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung			Anggaran	Satuan Output	Target Output	Target Output Bulanan											
		KRO	RO	Komponen				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Meningkatnya Pelaku Usaha/Kegiatan yang Diawasi Terhadap Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK		Rp. 15.602.490.000	Badan Usaha	310	10	30	55	75	107	142	177	209	241	268	295	310
				051. Penanganan Pengaduan Perusahaan	Rp. 3.314.500.000	Badan Usaha	130	5	15	25	35	47	62	77	89	101	113	125	130
				052. Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Rp. 2.162.000.000	Pengaduan	230	5	15	30	50	75	100	130	160	185	205	220	230
				053. Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 5.925.990.000	Badan Usaha	180	5	15	30	40	60	80	100	120	140	155	170	180
				054. Sanksi Administrasi	Rp. 2.600.000.000	Sanksi	200	15	30	45	65	85	105	125	145	165	180	195	200
				055. Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 1.600.000.000	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	051. Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	Rp. 2.000.000.000	Orang	250	0	30	60	90	120	150	180	180	210	240	270	300

Jakarta, 15 Januari 2024

Direktur,

Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M.

NIP. 19800331 200312 1 003